



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELP. (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SK. 434/BRSDM.05/RC.221/V/2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020 – 2024**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui penyelenggaraan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;

b. Bahwa untuk mendukung visi dan misi KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi unit pelaksana teknis lingkup pelatihan dan penyuluhan perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2019, tentang pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan, 1995);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan,
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2011, tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan,
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Per-BRSDM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA
STRATEGIS PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020 – 2024

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Pusat ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024, yang selanjutnya disebut Renstra Puslatluh KP, adalah dokumen perencanaan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Pusat adalah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Renstra Puslatluh merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pusat dalam menyusun kegiatan dan anggaran pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan Tahun 2020 – 2024.
- (2) Renstra Puslatluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra Puslatluh, meliputi:

- a. pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan, dan lingkungan strategis, isu-isu strategis;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan, kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Renstra Puslatluh sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pusat terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Kerangka Pendanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan tercantum dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Mei 2020

KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN
PENYULUHAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN,



LILLY APRILYA PREGIWATI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan ke-empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan

juga network/komunikasi, sedangkan pada era *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society 5.0* manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*transfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

B. Kondisi Umum

1. Capaian Program dan Kegiatan

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sampai dengan saat ini telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM KP dengan capaian sebagai berikut:

- 1) Jumlah lulusan pelatihan pada tahun 2019 sebanyak 24.242 orang yang terdiri dari pelatihan masyarakat sebanyak 22.650 orang dan pelatihan aparatur sebanyak 1.592 orang. Adapun capaian kegiatan pelatihan mulai tahun 2015 sampai dengan 2019, disajikan ke dalam tabel 1.

Tabel 2. Jumlah lulusan pelatihan aparatur dan masyarakat tahun 2015 - 2019

Satuan : Orang

No	Nama Balai	2015										2016										2017										2018										2019									
		2015		2016		2017		2018		2019		2015		2016		2017		2018		2019		2015		2016		2017		2018		2019																					
		Pelatihan Aparatur	Pelatihan Masyarakat																																																
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(11)	(12)	(11)	(12)	(11)	(12)	(11)	(12)	(11)	(12)	(11)	(12)	(11)	(12)	(11)	(12)	(11)	(12)																						
1	BPPP Bitung	154	3,335	206	3,419	0	990	120	1,920	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400																						
2	BPPP Ambon	307	2,665	275	2,540	0	840	120	1,592	0	3,436	0	3,436	0	3,436	0	3,436	0	3,436	0	3,436	0	3,436	0	3,436	0	3,436	0	3,436																						
3	BPPP Banyuwangi	514	5,854	518	4,929	0	1,590	120	3,630	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120																						
4	BPPP Medan	398	3,799	360	3,570	0	1,080	120	2,010	0	3,680	0	3,680	0	3,680	0	3,680	0	3,680	0	3,680	0	3,680	0	3,680	0	3,680	0	3,680																						
5	BPPP Tegal	488	6,999	586	4,970	0	1,790	120	6,349	0	8,014	0	8,014	0	8,014	0	8,014	0	8,014	0	8,014	0	8,014	0	8,014	0	8,014	0	8,014																						
6	BDA Sukamandi	1,886	0	2,774	0	2,090	0	2,278	0	1,592	0	1,592	0	1,592	0	1,592	0	1,592	0	1,592	0	1,592	0	1,592	0	1,592	0	1,592	0	1,592																					
7	Pusat Pelatihan	0	0	0	0	3,810	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Jumlah		3,747	22,652	4,719	19,428	5,900	6,290	2,878	16,501	1,592	22,650	1,592	22,650	1,592	22,650	1,592	22,650	1,592	22,650	1,592	22,650	1,592	22,650	1,592	22,650	1,592	22,650	1,592	22,650																						
Total		26,399		24,147		12,190		19,379		24,242		24,242		24,242		24,242		24,242		24,242		24,242		24,242		24,242		24,242																							

Sumber: Puslatuh KP

- 2) Jumlah kelompok mandiri pada tahun 2019 sebanyak 1.522 kelompok. Adapun jumlah kelompok pelaku utama kp per provinsi mulai dari tahun 2015 -2019 sebagaimana tersaji ke dalam tabel 2 dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah kelompok pelaku utama KP , 2015 – 2019

Satuan: Kelompok

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	1,252	1,522	1,623	1,561	1,531
2	Sumatera Utara	1,370	1,622	779	1,281	1,261
3	Sumatera Barat	1,654	1,685	1,593	1,310	1,290
4	Riau	1,323	1,376	954	885	875
5	Jambi	888	1,069	685	1,103	1,094
6	Sumatera Selatan	917	1,336	1,205	1,354	1,324

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
7	Bengkulu	864	984	1,037	894	894
8	Lampung	1,489	1,821	953	1,631	1,611
9	Kep. Bangka Belitung	481	537	412	668	668
10	Kepulauan Riau	566	883	104	172	172
11	Banten	243	201	126	270	269
12	DKI Jakarta	7,215	7,635	2,155	193	193
13	Jawa Barat	7,489	8,186	2,867	3,028	2,973
14	Jawa Tengah	1,678	1,489	680	2,998	3,098
15	DIY	5,640	6,055	3,804	547	547
16	Jawa Timur	1,753	1,735	393	4,416	4,536
17	Bali	2,745	2,613	909	1,394	1,370
18	NTB	2,020	2,204	1,524	1,657	1,627
19	NTT	1,345	1,714	1,042	1,089	1,069
20	Kalimantan Barat	1,393	1,424	733	1,256	1,236
21	Kalimantan Tengah	905	944	909	530	520
22	Kalimantan Selatan	2,306	2,521	1,385	1,571	1,541
23	Kalimantan Timur	812	1,075	473	454	444
24	Kalimantan Utara	167	329	498	446	446
25	Sulawesi Utara	1,414	1,586	893	901	901
26	Sulawesi Tengah	876	1,080	834	779	779
27	Sulawesi Selatan	2,750	3,707	3,500	3,506	3,625
28	Sulawesi Tenggara	937	1,154	1,586	1,222	1,222
29	Gorontalo	929	822	668	499	499
30	Sulawesi Barat	389	545	436	488	488
31	Maluku	912	1,059	978	786	786
32	Maluku Utara	1,060	1,147	630	425	425
33	Papua Barat	512	464	172	220	220
34	Papua	694	829	460	466	466
Jumlah		56,988	63,353	37,000	40,000	40,000

Sumber: Puslatluh KP

- 3) Jumlah Sertifikasi kompetensi yang telah dihasilkan mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 80.978 sertifikat. Data sertifikasi kompetensi menurut bidang kompetensi tahun 2015 – 2019, sebagaimana tabel dibawah

Tabel 4. Jumlah Sertifikasi Kompetensi SDM KP menurut Bidang Kompetensi Tahun 2015 - 2020

No	Kompetensi	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Penangkapan Ikan	13.184	7.356	3.441	540	2.236	26.757
2	Budidaya Perikanan	11.269	5.473	2.586	1.181	239	20.748
3	Mesin Perikanan	5.973	3.291	579	30	30	9.903

No	Kompetensi	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
4	Pengolahan Hasil Perikanan	8.499	4.435	2.654	3.772	900	20.260
5	Penyuluh Perikanan	1.838	885	78	0	0	2.801
6	Kelautan	138	60	216	0	95	509
	Jumlah	40.901	21.500	9.554	5.523	3.500	80.978

Sumber: LSP – KP

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

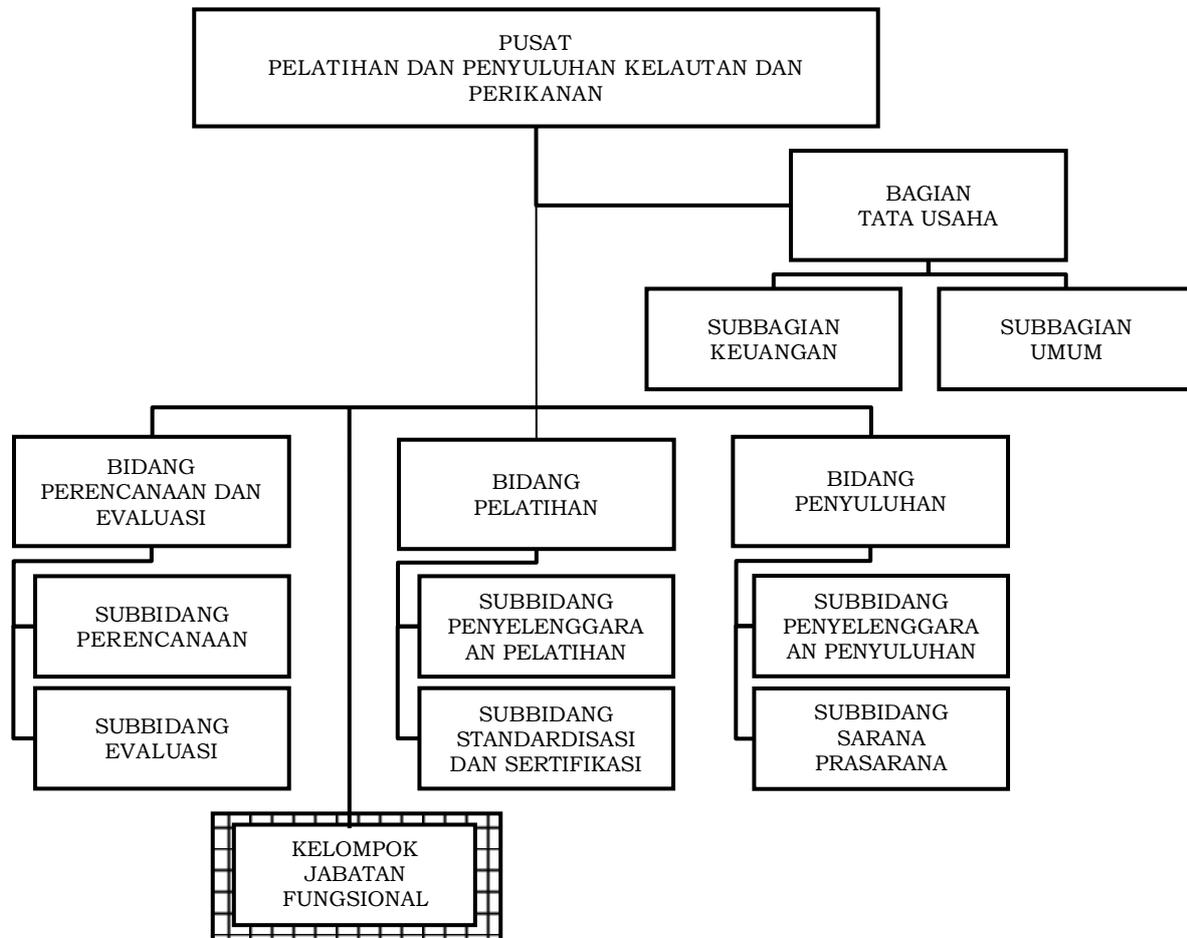
1.1 Organisasi

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit eselon II dibawah BRSDM - Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Permen-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Puslatluh KP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Puslatluh KP menyelenggarakan berbagai fungsi yaitu :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2) penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3) penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- 4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Cakupan organisasi Puslatluh KP meliputi: 1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi; 2) Bidang Pelatihan; 3) Bidang Penyuluhan; 4) Bagian Tata Usaha; dan 6) Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan melalui pelatihan, yaitu : 1 Balai

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, 5 Balai Pelatihan dan Penyuluhan, dan melalui penyuluhan secara teknis diselenggarakan di 9 Satminkal (5 BPPP dan 4 Balai Riset). Struktur organisasi Puslatluh KP disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Puslatluh

1.2 Sumberdaya

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sejalan dengan visi dan misi KKP, kegiatan pelatihan dan penyuluhan juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan

sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sehingga keberadaan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menjadi sangatlah relevan.

a. Sumberdaya Manusia

Puslatluh KP memiliki pegawai sebanyak 5.214 orang pada tahun 2020, yang terdiri dari 3.045 orang PNS (58,4%) dan 2.169 tenaga Kontrak (41,6%). Adapun PNS terdiri dari 2.855 (93,8%) sebagai pegawai fungsional dan sisanya 190 (6,2%) adalah pegawai struktural, sedangkan untuk tenaga kontrak terdiri dari 125 tenaga kontrak dan 2.044 adalah penyuluh perikanan bantu (PPB).

Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi SDM PNS Puslatluh KP terdiri atas 889 pegawai (29,2%) berpendidikan di bawah S1; 1.949 pegawai (64,0%) berpendidikan S1, 204 pegawai (6,7%) berpendidikan S2 dan 3 pegawai (0,1%) berpendidikan S3. Sebaran pegawai berdasarkan jabatan fungsional disajikan pada Tabel 4.

Tabel 5. Pegawai Fungsional PUSLATLUH KP, 2020

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Penyuluh perikanan	2.660
2	Instruktur	101
3	Widyaiswara	87
4	Arsiparis	4
5	Pranata computer	2
6	Pengelola pengadaan barang dan jasa	1
	Jumlah	2.885

Penjabaran terkait dengan kondisi umum kegiatan pelatihan dan penyuluhan juga tidak bisa terlepas dari kondisi sasarannya, sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kondisi SDM Aparatur Pusat

Perkembangan jumlah SDM aparatur sektor KP dari tahun ke tahun selalu meningkat dengan jumlah SDM aparatur KP yang paling tinggi adalah di unit kerja Eselon I BPSDMKP. Tabel 5 menunjukkan

perkembangan jumlah total SDM aparatur KP pada masing-masing unit eselon 1 KKP yang sekaligus juga sebagai sasaran pelatihan aparatur.

Tabel 6. Jumlah SDM aparatur kp menurut unit kerja Eselon I KKP, 2020

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1	Sekretariat Jenderal	589
2	Inspektorat Jenderal	221
3	Ditjen. Perikanan Tangkap	1313
4	Ditjen. Perikanan Budidaya	1381
5	Ditjen. PDSPKP	369
6	Ditjen. Pengelolaan Ruang Laut	665
7	Ditjen. PSDKP	1265
9	Badan Pengembangan SDM KP	5477
10	Badan Karantina, Pengedali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1875
	Jumlah	13.155

Adapun jumlah pegawai aparatur lingkup pelatihan dan penyuluhan adalah sebagaimana tabel 6. Dibawah ini

Tabel 7. Jumlah pegawai menurut unit kerja dan golongan lingkup pelatihan dan penyuluhan KP, tahun 2020

No	Unit Kerja	Gol/Ruang			
		I	II	III	IV
1	Puslat KP	-	3	38	15
2	BDA Sukamandi	1	17	21	9
3	BPPP Medan	1	47	250	36
4	BPPP Tegal	-	49	321	50
5	BPPP Banyuwangi	3	36	297	60
6	BPPP Bitung		56	200	28
7	BPPP Ambon		117	168	15
8	BRPPUPP Palembang (PP)		43	234	32
9	BRPBATPP Bogor (PP)		15	121	48
10	BBRPBLPP Gondol (PP)		40	225	51
11	BRPAPPP Maros (PP)		44	305	80
	Jumlah	5	467	2.180	424
	Total		3.045		

2) Penyuluh Perikanan

Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat sebanyak 3.216 orang. Namun dengan berjalannya waktu, ada beberapa penyuluh yang memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan beralih jabatan ke fungsional lainnya, sehingga saat ini jumlah Penyuluh Perikanan PNS

adalah sebanyak 2.677 orang. Selain Penyuluh Perikanan PNS, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP juga merekrut 2.100 Orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).

Tabel 8. Jumlah SDM Penyuluh Perikanan PNS

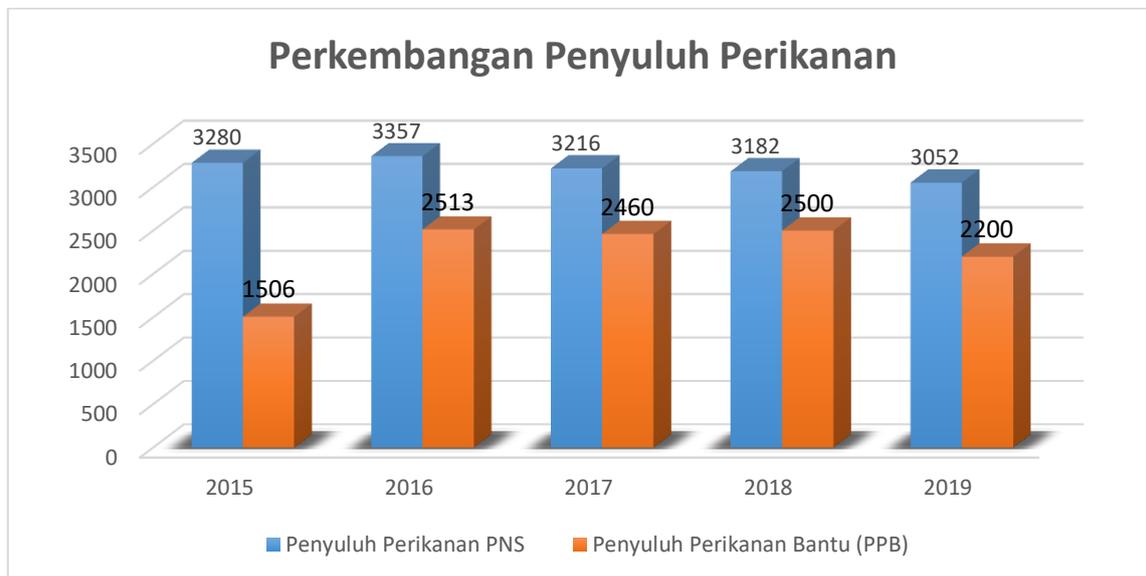
Satuan : Orang

No	PROVINSI	PNS	PPB
1	ACEH	103	112
2	SUMATERA UTARA	40	93
3	SUMATERA BARAT	86	81
4	RIAU	48	53
5	JAMBI	46	35
6	SUMATERA SELATAN	117	70
7	BENGKULU	80	44
8	LAMPUNG	56	54
9	BANGKA BELITUNG	28	19
10	KEPULAUAN RIAU	5	26
11	DKI JAKARTA	5	15
12	BANTEN	21	33
13	JAWA BARAT	149	164
14	JAWA TENGAH	229	199
15	DIY	31	24
16	JAWA TIMUR	208	236
17	BALI	59	45
18	NTB	100	83
19	NTT	70	88
20	KALIMANTAN BARAT	82	45
21	KALIMANTAN TENGAH	77	12
22	KALIMANTAN SELATAN	124	47
23	KALIMANTAN TIMUR	26	23
24	KALIMANTAN UTARA	27	22
25	SULAWESI UTARA	79	48
26	SULAWESI TENGAH	77	53
27	SULAWESI SELATAN	255	124
28	SULAWESI TENGGARA	119	67
29	GORONTALO	45	28
30	SULAWESI BARAT	30	28
31	MALUKU	60	34
32	MALUKU UTARA	59	18
33	PAPUA	77	23
34	PAPUA BARAT	59	12
	TOTAL	2.677	2.058

* Data s.d. Maret 2020

(Sumber: Bidang Penyuluhan- Puslatuh – KKP)

Jumlah SDM Penyuluh Perikanan saat ini yang menjadi pegawai KKP dapat dilihat pada Tabel 7. Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan pendampingan, terhitung mulai tahun 2015 – 2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebaliknya mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah penyuluh baik penyuluh perikanan PNS maupun PPB cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. perkembangan jumlah Penyuluh perikanan dapat dilihat pada Gambar 2.



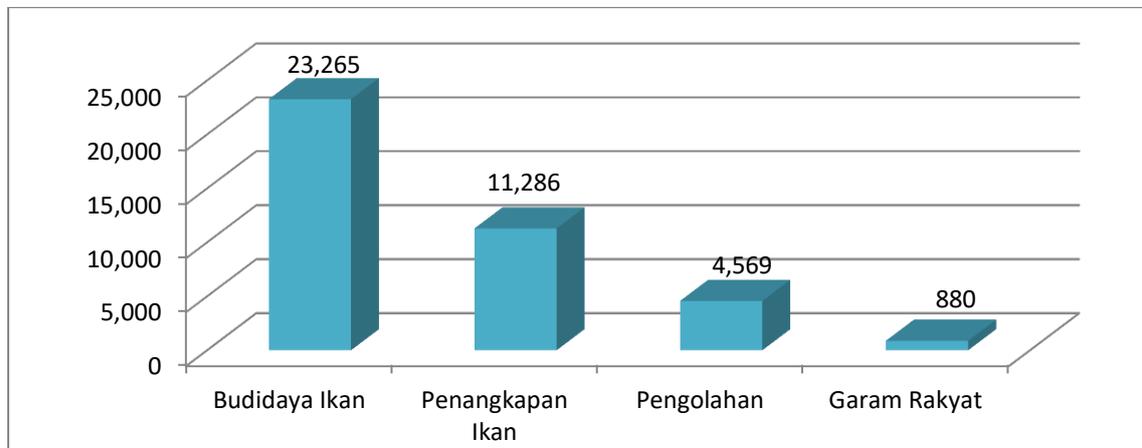
Gambar 2. Perkembangan Penyuluh Perikanan tahun 2015 - 2019

3) Kelompok Pelaku utama/ Pelaku usaha

Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari pelaku utama/usaha yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, penggiat konservasi dan masyarakat profesi lainnya. Jumlah pelaku utama/usaha kelautan perikanan saat ini mencapai 6,5 jt orang yang 90% diantaranya berusaha dalam skala mikro dan tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat untuk RTP pengolahan dan sedikit mengalami penurunan untuk dua RTP lainnya.

Kegiatan penyuluhan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku utama, pelaku usaha dan keluarganya. Dengan demikian karakteristik dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha menjadi faktor yang harus diperhatikan. Sasaran kegiatan penyuluhan lebih kepada kelompok pelaku utama/usaha bukan individu. Kelembagaan kelompok pelaku utama di sektor perikanan yang ada saat ini sangat bervariasi baik dari kemampuan kelas kelompok maupun dari jenis komoditas yang diusahakan.

Sebagian besar kelompok pelaku utama tidak hanya melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan, umumnya mereka juga melaksanakan kegiatan usaha diluar sektor perikanan seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan lainnya. Jumlah kelompok per bidang usaha tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Jumlah Kelompok Menurut Bidang Usaha tahun 2019

b. Sumberdaya Sarana-Prasarana

Sarana Prasarana berupa aset yang dimiliki oleh Puslatluh KP meliputi aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud terkait pelaksanaan fungsi pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan diantaranya gedung, asrama, ruang kelas, workhsop, sarana laboratorium, sarana praktek, dan lain sebagainya yang tersebar di unit kerja untuk mendukung dalam menghasilkan sebuah output keluaran dari kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Aset Puslatluh KP tahun 2018, disajikan pada Tabel 8. Aset tak berwujud Puslatluh KP merupakan aset non moneter yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memberikan kontribusi bagi institusi berupa data informasi, paten, hasil inovasi kaji widya serta software dan lisensi.

Tabel 9. Aset Puslatluh KP Tahun 2020

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	Tanah (Ha)	164.474	394.975.468.448
2	Peralatan dan mesin (Unit)	22.008	114.615.039.728
3	Gedung dan bangunan (Ha)	289	103.679.489.924
4	Jalan dan jembatan (meter)	152.184	14.458.200.550
5	Irigasi (meter)	5.493	4.346.696.000
6	Jaringan (meter)	26	2.854.445.600
7	Asset tetap renovasi (paket)	-	-
8	Asset tetap lainnya (paket)	2.301	656.561.970
9	Hak cipta (buah)	-	-
10	Paten (buah)	-	-

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah (Rp)
11	Software (buah)	1	17.500.000
12	Lisensi (unit)	-	-
13	Hasil kajiwidya (buah)	-	-
14	Aset tak berwujud lainnya (unit)	-	-
	Jumlah	346.776	635.603.402.220

Sumber : Sekretariat BRSDMKP (2018)

Puslatluh KP memiliki fasilitas kapal latih sejumlah 6 buah kapal yang tersebar di UPT Pelatihan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan kelautan dan pengembangan SDM.

Tabel 10. Jumlah Kapal Latih Lingkup Pelatihan KP

No	UPT	Jumlah		Nama	Thn Pengadaan	(GT)	Dimensi Kapal (M)	Material	Alat Tangkap
1	BPPP Medan	2	1	KM Layang 01	1976	5	9,1 x 4,35 x 0,9	Fiber	Gill nett
			2	KM Cakalang	2007	74	21,77 x 5,9 x 2,75	Fiber	Purse seine
2	BPPP Tegal	1	1	KM Ekor Kuning	2006	90	28 x 6,4 x 3	Fiber	Multi purpose
3	BPPP Banyuwangi	1	1	KM Marlin	2006	60	29,5 x 5,6 x 2,2	Fiber	Longlin, Pole and Line, Hand Line
4	BPPP Aertembaga	1	1	KM Bobara	2005	68	23,46 x 6 x 2,28	Fiber	Purse seine
5	BPPP Ambon	1	1	KM Cahaya Martha Alfons	2011	18	20 x 3,5 x 1,4	Kayu Lapis Fiber	Purse seine, Long Line

Sumber : BRSDMKP dalam Angka (2018)

c. Sumberdaya Lainnya

1) Kurikulum, Modul dan Diklat Internasional

Kurikulum yang sudah dibuat sebanyak 39 buah diantaranya: Kurikulum Pelatihan teknis bagi aparaturnya, kurikulum pelatihan fungsional bagi aparaturnya, kurikulum pelatihan teknis bagi non aparaturnya. Modul yang sudah dibuat sebanyak 662 modul diantaranya: modul pelatihan fungsional Pengawas Perikanan. Sarana dan Prasarana Pelatihan antara lain Sarana *Basic Safety Training (BST)* sebanyak 4 unit dikelola oleh BPPP Belawan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi dan BPPP Ambon, dengan kondisi baik.

Penyelenggaraan pelatihan yang bertaraf internasional, sesuai konvensi STCW-F (International Convention on Standards of Training,

Sertification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) 1995 yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO) mengenai Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan bagi Pelaut Kapal Penangkap Ikan, mencakup pelatihan terkait:

- Diklat Keselamatan Dasar Pelaut Kapal Penangkap Ikan (*Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel*);
- Diklat Lanjutan Penanggulangan Kebakaran (*Advanced Fire Fighting*);
- Diklat Ketrampilan Pertolongan Medis Darurat (*Medical Emergency First Aid*);
- Diklat Ketrampilan Perawatan Medis di atas Kapal (*Medical Care on Board*);
- Diklat Ketrampilan Operator Radio Umum untuk GMDSS (*General Radio Operator Certificate/ GOC for the GMDSS*);
- Diklat Ketrampilan Operator Radio Terbatas untuk GMDSS (*Restricted Radio Operator Certificate/ ROC for the GMDSS*);
- Diklat Kecakapan Pesawat Luput Maut dan Skoci Penyelamat (*Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats*);
- Diklat IMO model course 3.12 dan 6.09 untuk Pelatih dan Penguji (target sasaran peserta diklat adalah guru, dosen, widyaiswara dan instruktur) dan Diklat IMO model course 6.10 untuk simulator.
- Diklat syahbandar perikanan
- Diklat tatalaksana kesyahbandaran bagi pembantu syahbandar perikanan

2) Kerjasama

Pusat Pelatihan KP senantiasa berupaya membangun jaringan kerja sama yang luas dengan seluruh pihak terkait dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan. Kegiatan fasilitasi kerja sama pelatihan yang telah dijajagi meliputi: kerjasama antara Pusat Pelatihan KP dengan Pemerintah daerah, kementerian, dunia industri dan institusi lain di dalam maupun di luar negeri.

Pelatihan-pelatihan yang dijadikan sebagai kontribusi KKP didunia internasional, seperti: pelatihan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing mengenai International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) Regional Training for Investigators and Prosecutors for African Countries. Pelatihan ini diikuti 15 peserta dari Indonesia dan 5 negara Afrika, yaitu Tanzania, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, dan Namibia. Pelatihan internasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang kelautan, perikanan, dan keamanan maritim bagi 10 negara Afrika dan Timur

Tengah, yaitu Afrika Selatan, Aljazair, Madagaskar, Maroko, Mauritius, Mesir, Nambia, Sudan, Tanzania, Tunisia, serta 4 negara Asia Pasifik (Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Timor Leste).

3) Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP)

Lembaga pelatihan/permagangan di bidang kelautan dan perikanan yang dibentuk dan dikelola oleh pelaku utama maju di bidang kelautan dan perikanan baik perorangan maupun kelompok. P2MKP merupakan wujud partisipasi dan keswadayaan masyarakat ikut mengembangkan SDM melalui pelatihan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jumlah P2MKP yang sudah terbentuk sampai dengan tahun 2016 sebanyak 413.

4) Sasaran pelatihan KP

Program pelatihan KP dalam periode waktu 2017-2019, telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi dukungan kegiatan pelatihan terhadap program prioritas seperti peningkatan kompetensi dan pendampingan di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Prioritas (KIP), Kegiatan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP, program Bantuan Pemerintah, Program SKPT, Peningkatan Produksi Garam, Program Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan program prioritas lainnya.



Gambar 4. Sasaran Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan

5) Sertifikasi Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

BRSDM-KP bersama dengan asosiasi, dunia usaha/industri dan masyarakat lainnya telah menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Kelautan dan Perikanan Pihak Ketiga (LSP-P3) terdiri dari (1) LSP Kelautan dan Perikanan (LSP-KP); (2) LSP Kelautan (LSP-K); (3) LSP Akuakultur Indonesia (LSP-AI); dan (4) LSP Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan (LSP-PHPMI) yang merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang kelautan dan perikanan yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sedangkan LSP Pihak Kesatu (LSP-P1) yang telah ditetapkan oleh BNSP yaitu 18 terdiri dari (1) LSP-P1 BPPP Banyuwangi; (2) LSP-P1 BPPP Tegal; (3) LSP-P1 BPPP Medan; (4) LSP-P1 BPPP Aertembaga; (5) LSP-P1 BPPP Ambon; (6) LSP-P1 BDA Sukamandi; (7) LSP-P1 STP Jakarta; (8) LSP P-1 Poltek KP Sidoarjo; (9) LSP-P1 Poltek KP Bitung; (10) LSP-P1 Poltek KP Sorong; (11) LSP-P1 SUPM Ladong; (12) LSP-P1 SUPM Pariaman; (12) LSP-P1 SUPM Kota Agung; (13) LSP-P1 SUPM Pontianak; (14) LSP-P1 SUPM Tegal; (15) LSP-P1 SUPM Bone; (16) LSP-P1 SUPM Sorong; (17) LSP-P1 SUPM Waiheru; (18) LSP-P1 SUPM Kupang. Selama kurun waktu tahun 2009-2017, Pusat Pelatihan KP bekerja sama dengan (1) LSP-KP telah menghasilkan 74.852 sertifikat kompetensi yang dihasilkan dari 68 TUK oleh 1.850 asesor kompetensi; (2) LSP-K telah menghasilkan 1452 sertifikat kompetensi yang dihasilkan dari 20 TUK oleh 68 asesor kompetensi; dan (3) LSP-AI telah menghasilkan 212 sertifikat kompetensi yang dihasilkan dari 9 TUK oleh 16 asesor kompetensi. Jumlah SKKNI di bidang kelautan dan perikanan yang dihasilkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 38 SKKNI dan 3 Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3).

6) Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan

Peran BRSDM KP melalui penyuluhan, sebagaimana diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, status kepegawaian penyuluh perikanan sudah dialihkan dari daerah ke pusat. Kondisi ini menjadi energi baru bagi KKP dalam mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, institusi non pemerintah, dan stakeholder lainnya. Peran penyuluh sebagai center of excellence, agent of change (agen perubahan) dan agent of empowerment (agen pemberdayaan) mendukung pencapaian tujuan program KKP. Penyuluh harus mampu memberikan pelayanan pada masyarakat, termasuk termasuk melakukan transformasi budaya sebagai salah satu pilar poros maritim. Penyuluh juga memiliki tugas untuk menyampaikan hasil riset dan pelatihan kepada pelaku utama, mampu memerangi kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, degradasi lingkungan

pesisir dan laut, meningkatkan produktivitas perikanan, memperluas akses permodalan, serta meningkatkan kualitas SDM pelaku utama perikanan.

Peran penyuluh yang telah dilakukan pada periode 2015 – 2019 diantaranya:

1. Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;
2. Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR);
3. Pendampingan Bantuan Pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, *ice flake*, dll.);
4. Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
5. Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
6. Sosialisasi peraturan per-UU perikanan;
7. Pendampingan dan Penyuluhan di 12 SKPT;
8. Pendataan Pelaku Usaha KP (KUSUKA) dan *sampling* produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar dan petambak garam) dalam Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
9. Pengusulan dan Pemanfaatan Bale Kusuka sebagai sarana informasi pembangunan KP dan penyuluhan pelaku utama.

Bentuk kelembagaan penyuluhan perikanan meliputi:

a. Tingkat pusat

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang menangani penyuluhan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

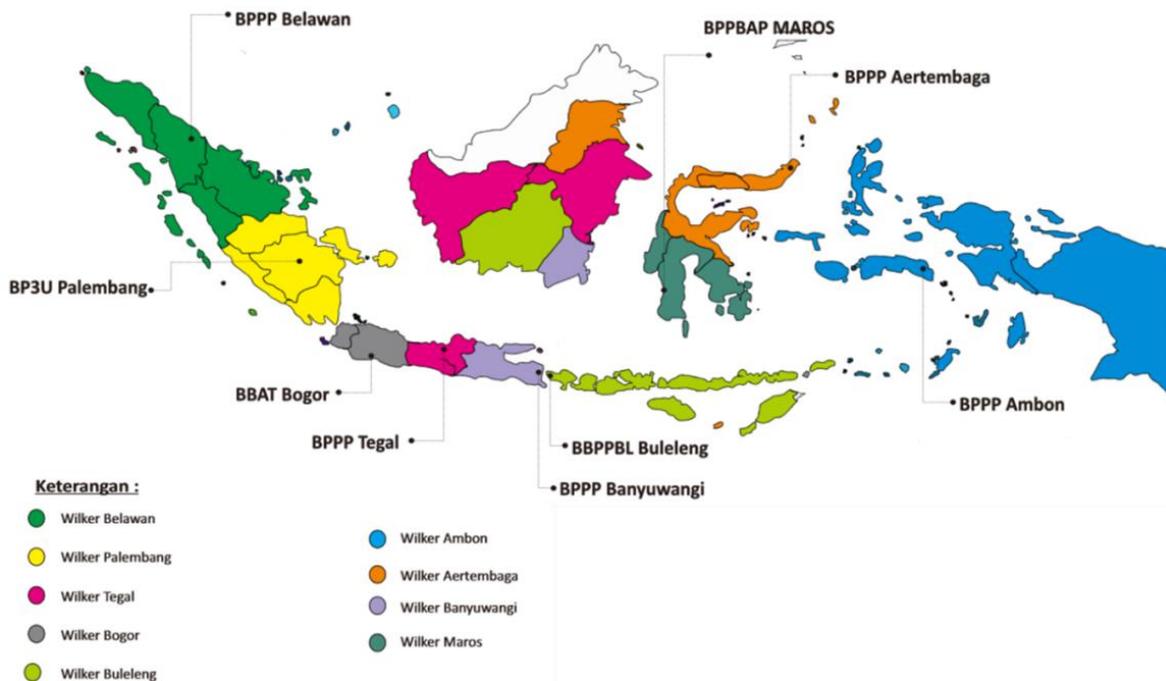
b. Tingkat regional

Satminkal dengan pembagian wilayah kerja meliputi 2-6 provinsi yaitu 5 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan serta 4 Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan. Dengan pembagian wilayah regional sebagai berikut:

- a) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Belawan: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau;
- b) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal: Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat;
- c) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi: Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan;

- d) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Aertembaga: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- e) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon: Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua;
- f) Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan Palembang: Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung;
- g) Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan Bogor: Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten;
- h) Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan Maros: Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara;
- i) Balai Riset dan Penyuluhan Buleleng: Bali, NTB dan NTT;

Satuan administrasi pangkal untuk kepegawaian penyuluh perikanan, akan berada di Balai Pelatihan dan Penyuluhan serta Balai Riset dan Penyuluhan, sementara Penyuluh Perikanan tetap berkedudukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan atau Dinas yang menangani perikanan di Kabupaten/Kota.



Gambar 5. Distribusi Wilayah Kerja (Wilker) Satminkal Penyuluhan Perikanan

7) Digitalisasi Pelatihan dan Penyuluhan

Implementasi program digitalisasi pelatihan dan penyuluhan KP yang siap operasional tahun 2020 yaitu online training untuk pelatihan

dan E-Penyuluh untuk kegiatan penyuluhan KP. Kedua aplikasi tersebut dirancang bangun kerjasama Puslatluh KP dengan Pusdatin dengan pembiayaan rancang bangun software oleh Pusdatin Setjen KKP. Aplikasi Online Training bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan yang menjangkau kawasan yang luas, biaya murah, terakreditasi, tidak terkendala waktu, cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu, dalam rangka mengembangkan Sistem Kerja Smart Office bagi Aparatur Sipil Negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan terpilih menjadi salah satu pusat percontohan role model ASN berkerja secara mobile dari rumah. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. Setiap kinerjanya akan dipotret melalui sistem E- Penyuluh. Melalui aplikasi ini diharapkan penyuluh perikanan juga mampu meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan. Beberapa informasi terkait E-Penyuluh sebagai berikut:

- a. Aplikasi E-Penyuluh merupakan adalah alat bantu dalam bentuk aplikasi berbasis web dan mobile bagi Penyuluh Perikanan dengan subntansi pokok pelaporan aktivitas dan kinerja Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok Penyuluhan dan pendampingan pada pelaku utama KP (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam) dan pelaku usaha KP di tingkat lapangan.
- b. Manfaat E-Penyuluh antara lain:
 - 1) Hasil kegiatan diinput langsung dalam modul e-penyuluh yang telah dipasang di handphone;
 - 2) Modul e-penyuluh dapat dibuka dan diinput secara off-line tidak tergantung jaringan internet;
 - 3) Laporan kegiatan dan capaian target (kinerja) dibuat otomatis dalam format standar yang telah ditentukan dengan konten informasi diambil dari data yang telah diinput;
 - 4) Modul e-penyuluh terintegrasi dengan modul KUSUKA dan Pendataan Produksi, Kegiatan pendataan dapat dilakukan pada perangkat handphone yang sama;
 - 5) Kehadiran tercatat sesuai waktu masuk saat mengisi informasi kegiatan dan waktu keluar saat selesai melakukan kegiatan.

d. Anggaran

Penganggaran PuslatluhKP sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), dan penganggaran berbasis kinerja

(*performance-based budgeting*). Anggaran Puslatluh KP setelah terbentuk pada tahun 2017 (Rp.529.036.469.000,-) yang bersumber dari APBN (Gambar 6) mengalami peningkatan sebesar 24,6% pada tahun 2018 (Rp.659.213.182.000,-) dan pada tahun 2019 juga meningkat 2,4% menjadi Rp.687.062.834.000,-. Proporsi anggaran Puslatluh didominasi untuk belanja pegawai sebesar 47%, dikarenakan banyaknya penyuluh perikanan Pemerintah Daerah yang beralih menjadi pegawai pusat.. Perkembangan anggaran lingkup Puslatluh KP per Satker dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel 10.

Tabel 11. Data Pagu Satker UPT/SATMINKAL Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2017 – 2019

NO	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN TAHUN			TOTAL
		2017	2018	2019	
1	PUSAT	431,097,203,000	124,852,982,000	14,742,314,200	570,692,499,200
2	BDA SUKAMANDI	21,752,834,000	28,482,717,000	19,802,592,000	70,038,143,000
3	BP3 MEDAN	14,669,214,000	61,371,800,000	80,241,247,000	156,282,261,000
4	BP3 TEGAL	18,765,290,000	81,841,272,000	101,737,763,200	202,344,325,200
5	BP3 BANYUWANGI	18,402,552,000	71,742,855,000	91,070,031,200	181,215,438,200
6	BP3 BITUNG	13,865,676,000	48,814,329,000	61,187,632,400	123,867,637,400
7	BP3 AMBON	10,483,700,000	56,591,670,000	60,706,649,800	127,782,019,800
8	BP3U PALEMBANG	-	49,506,456,000	72,037,365,600	121,543,821,600
9	BPPBAT BOGOR	-	30,175,896,000	45,827,084,050	76,002,980,050
10	BPPBAP MAROS	-	55,905,385,000	75,752,824,750	131,658,209,750
11	BBPPBL GONDOL	-	49,927,820,000	63,957,329,800	113,885,149,800
		529,036,469,000	659,213,182,000	687,062,834,000	1,875,312,485,000

2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mengembangkan SDM guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan, dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu:

Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak

untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:

- a. Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai Pelatihan dan P2MKP yang masih kurang dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di P2MKP (safari), mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;
- c. Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP seperti di Wilayah Perbatasan, SKPT dan lainnya;
- d. Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
- e. Belum ada model pelatihan berbasis daring yang mudah diakses baik nasional maupun International;
- f. Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
- g. Rendahnya jumlah masyarakat KP yang kompeten dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP di setiap wilayahnya;
- h. Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;
- i. Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dibidang kelautan dan perikanan
- j. Standard kompetensi masih terbatas jumlahnya;
- k. Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;
- l. Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- m. Aspek pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan dan penyuluhan perikanan diantaranya:
- n. Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;
- o. Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;

- p. Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;
- q. Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer;
- r. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah;
- s. Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasi.
- t. Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:
- u. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;
- v. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;
- w. Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- x. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
- y. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- z. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

- a. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- b. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- c. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai ;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
- e. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- f. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- g. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- h. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

D. Lingkungan Strategis

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan, tugas tersebut dilakukan dengan melakukan fungsi-fungsi: Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan; Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan; Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat. Selain itu, juga tetap memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi pencapaian target kinerja pelatihan dan penyuluhan dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Situasi internal dan eksternal dalam lingkungan strategis yang dihadapi BRSDM KP meliputi:

1. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal

a. Tingkat Global

- 1) Adanya persyaratan kompetensi untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan sehingga mampu bersaing sesuai *guidelines for development of Regional Model Competency Standards (RMCS) ILO*;
- 2) Adanya pemenuhan persyaratan tentang kapasitas kelembagaan dan SDM bidang penangkapan ikan yang mengatur standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga awak kapal sesuai dengan konvensi yang dikeluarkan oleh IMO (*STCW-F 1995*);
- 3) Perkembangan era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 telah memicu digitalisasi dan otomatisasi di berbagai sektor dalam proses industri serta menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik;
- 4) Kompetensi pada bidang teknologi informasi yang harus dimiliki SDM KP untuk menghadapi persaingan di era globalisasi dan ekonomi digital;

b. Tingkat Regional

- 1) Implementasi kerjasama ekonomi dan perdagangan yang bersifat regional (APEC, MEA, dan WTO) maupun antar negara yang

bersifat bilateral, membutuhkan penyiapan riset dan SDM yang unggul;

- 2) Penetapan standar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan *ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System*;
- 3) Pertumbuhan penduduk sebagai modal SDM dan potensi meningkatkan konsumsi ikan;
- 4) Isu lingkungan (sampah plastik di laut, karbon biru dan kesehatan laut) serta pengelolaan perikanan (IUUF) dalam wilayah regional membutuhkan rekomendasi kebijakan BRSDM KP.

2. Faktor Strategis Lingkungan Internal di Tingkat Nasional

- 1) Konektivitas antar pulau;
- 2) Potensi sumber daya KP yang melimpah dimanfaatkan secara optimal karena 90% pemanfaat didominasi skala kecil baik di laut maupun perairan umum daratan;
- 3) Produk perikanan primer yang memiliki nilai tambah rendah masih mendominasi struktur perekonomian sektor KP;
- 4) Tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakat KP masih rendah.

3. Isu Strategis

Dalam merespon sejumlah isu yang berkembang disektor kelautan dan perikanan, keberadaan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berperan sangat penting. Beberapa isu strategis yang memerlukan kontribusi dari hasil pelatihan dan penyuluhan dikaitkan dengan program nasional dan kementerian, diantaranya adalah:

- a. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi di pulau terdepan, dengan sasaran untuk : (a) meningkatkan ekonomi rumah tangga kelautan dan perikanan, (b) menambah usaha kelautan dan perikanan menengah ke atas menjadi berdaya saing, dan (c) menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi nasional.
- b. Pengembangan *enterpreneuership* menuju *technopreneurship*, penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan iptek untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing dengan didukung oleh tata kelola yang baik (*good governance*). Para pelaku usaha KP perlu difasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, akses terhadap permodalan, pemasaran hasil dan akses

terhadap teknologi serta informasi, termasuk peningkatan kemampuan dalam menjalankan *co-management* pengelolaan sumberdaya KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan;

- c. Peningkatan keterampilan dan kompetensi dibidang teknik budidaya ikan (akuakultur), penangkapan, pengolahan produk dan peningkatan nilai tambah, keamanan pangan, konservasi melalui pengenalan alat tangkap ramah lingkungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim, termasuk didalamnya memperkenalkan mata pencaharian alternatif.
- d. Dalam bidang ekonomi dan industri, pada tahun 2016 Indonesia memasuki era *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai konsekuensi dari berlakunya kesepakatan internasional. Beberapa persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam rangka menghadapi MEA, yaitu: 1) masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*); 2) rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja; 3) pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tak terdidik sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah; 4) meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 5) ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarsektor ekonomi; 6) sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah; 7) pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 10 negara anggota ASEAN; ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA; 8) tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan; serta 9) masalah Tenaga Kerja Indonesia yang banyak tersebar di luar negeri.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.2 Misi

Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi. Misi Puslatluh adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari.

- Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.3 Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 12. Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam Renstra Puslatluh KP

Visi	Misi	Tujuan
Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten	Misi 1. Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan	1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
		2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.

Visi	Misi	Tujuan
	Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP;	3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
	Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP	4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik

2.4 Sasaran Strategis Puslatluh KP 2020 - 2024

Renstra Puslatluh KP tahun 2020 - 2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Puslatluh KP dalam mendukung target kinerja sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SS-6 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- SS-7 Industrialisasi KP berdaya saing
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif
- SS-9 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDMKP tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai BRSDM pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SS1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- SS4 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SS5 Tatakelola pemerintahan yang baik

Selanjutnya Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDMKP tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP dan BRSDMKP adalah sebagai berikut :

- SS1 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
- SS2 Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan
- SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- SS4 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dalam penyusunannya, PuslatluhKP menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *Customer perspective*, *Internal Process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja:

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. SS ini diturunkan ke BRSDM menjadi “Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP yang meningkat” dengan IKU pembentuk yaitu “kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya”, setiap tahun sebanyak 1.500 kelompok selama tahun 2020-2024 dan IKU “Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk” dengan target 2.000 setiap tahun selama 2020-2024.

Kedua IKU tersebut selanjutnya diturunkan menjadi Indikator kinerja Puslatluh kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya, dengan target tahun 2020 sebanyak 1.735 kelompok dan tahun berikutnya setiap tahunnya sebanyak 2.000 kelompok selama tahun 2021-2024 dan IKU calon kelompok pelaku utama/usaha yang akan dibentuk menjadi kelompok dengan target 2.100 kelompok setiap tahunnya selama 2020 - 2024.

Customer Perspective

Sasaran strategis ke-dua (SS-2) yang akan dicapai adalah Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan, dengan indikator kinerja:

Desa mitra yang menerapkan Iptek KP, di BRSDM target IKU desa mitra yang menerapkan IPTEK KP tahun 2020-2024 adalah sebanyak 54 desa, dari 54 desa, PuslatluhKP berkontribusi 5 desa setiap tahunnya, atau selama tahun 2020-2024 sebanyak 25 desa mitra.

Internal Process Perspective

Sasaran strategis ke-tiga (SS-3) yang akan dicapai adalah Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri dari 60 % orang pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024.
- 2) Jumlah lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) pada tahun 2020 sebanyak 25 orang, tahun 2021 sebanyak 105 orang, dan tahun 2024 sebanyak 155 orang.
- 3) SDM KP yang dilatih pada tahun 2020 sebanyak 10.000 orang dan menjadi 30.000 orang pada tahun 2024.
- 4) Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 180 orang pada tahun 2020, menjadi 10.000 pada tahun 2024.
- 5) Aparatur KP yang dilatih sebanyak 3.320 orang pada tahun 2020, dan pada tahun 2024 sebanyak 3.325 orang yang dilatih.
- 6) Percontohan Penyuluhan KP yang diterapkan sebanyak 12 unit pada tahun 2020, dan menjadi 50 unit pada tahun 2024.
- 7) Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2020 sebanyak 5 unit dan tahun 2024 menjadi 10 unit.
- 8) Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat sebanyak 6 lembaga pada tahun 2020, dan menjadi 10 lembaga pada tahun 2024.
- 9) Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti sebanyak 5 kerja sama setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Puslatluh KP melalui Sasaran strategis ke empat (SS-4) "Tatakelola pemerintahan yang baik" dengan indikator kinerja :

- Indeks Profesionalisme ASN dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024.
- Unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada tahun 2020 sebesar 82%.
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puslatluh KP dari Baik pada tahun 2020 menjadi Sangat Baik pada tahun 2024
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran sebedar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
- Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Puslatluh KP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan target setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 60%.
- Nilai Kinerja Anggaran Puslatluh KP dengan target 85 tahun 2020, dan target 89 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Agenda Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.
3. Agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Agenda Membangun Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Agenda Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.
6. Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major Project di KKP yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain terkait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)
2. Monev dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (PRL, PSDKP dan BKIPM).

5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan *database* kelautan dan perikanan
 - b. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif,
 - c. Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;
 - d. Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;
 - e. Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan), penguatan literasi maritim;
 - f. Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi
 - g. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
 - h. Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - j. Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

3.3 Arah Kebijakan Badan Riset dan SDM KP

Arah kebijakan BRSDM KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP yang ada. Berdasarkan penjabaran strategi pembangunan KP 2020 – 2024, strategi penguatan daya saing SDM, inovasi teknologi dan riset merupakan prioritas utama BRSDM KP yang diperoleh dari hasil analisis SWOT . Upaya yang akan dilaksanakan untuk memenuhi hal tersebut diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan riset untuk menyelesaikan isu dan permasalahan.
2. Meningkatkan peran riset serta inovasi teknologi dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan diseminasi hasil riset sesuai dengan upaya pengembangan industri kelautan dan perikanan.
4. Membangun hubungan melalui jaringan kemitraan dalam kerangka kerjasama riset dan industri.
5. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
6. Meningkatkan kompetensi ASN KP yang unggul dan berdaya saing global.
7. Membangun sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis digital.
8. Membangun sistem penyuluhan yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM.
9. Memperkuat kelembagaan dan manajerial riset dan SDM.

3.4 Arah Kebijakan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Kebijakan yang dilaksanakan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan dalam mendukung peran BRSDM dalam pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya yaitu:

A. Pelatihan KP

Pelatihan kelautan dan perikanan diselenggarakan melalui pelatihan bagi masyarakat dan aparatur. Pelatihan bagi masyarakat ditujukan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Sedangkan diklat bagi aparatur ditujukan bagi aparatur negara yang memiliki peran, partisipasi dan kontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan, baik aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun aparatur di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Diklat aparatur terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan, yaitu diklat teknis, struktural, dan fungsional.

Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi peningkatan kompetensi masyarakat KP agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha dan taraf kehidupannya. Pelatihan bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dan aparatur daerah yang membidangi kelautan dan perikanan, ditujukan untuk menyiapkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial, serta sebagai fasilitator bagi kepentingan para pelaku utama. Arah pelatihan KP yang dilaksanakan antara lain :

- a. Mengembangkan Sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
- b. Melakukan akreditasi program dan lembaga pelatihan KP;
- c. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP;
- d. Mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan;
- e. Mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan inkubator bisnis berbasis digital talent untuk menghasilkan startup di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (online training).

Tahun 2024 ditargetkan Pelatihan berstandar SKKNI & Internasional sejalan dengan target output 1 juta sertifikasi kompetensi dengan langkah langkah seperti menyusun kurikulum dan modul standar nasional dan internasional guna memenuhi Persyaratan kompetensi tenaga kerja global. Selain itu di tahun 2024 juga beberapa Balai Diklat ditargetkan sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Balai balai akan diinisiasi menjadi *training centre* yang spesifik seperti training centre mekanisasi, *training centre* budidaya dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibuat pola *container* standar berisi peralatan lengkap untuk melayani kebutuhan pelatihan-pelatihan teknis di sentra-sentra masyarakat, sebagai *mobile training center* melibatkan alumni satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai pelatih/instruktur. *Mobile training center* dapat berisi pelatihan penangkapan, permesinan, pengolahan dan budidaya.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pelatihan Kelautan dan Perikanan berbasis kompetensi, (b) Sertifikasi dan akreditasi pelatihan (c) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur). Kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam mendukung program kementerian diataranya adalah pelatihan pada masyarakat pelaku utama dan usaha.

Pelatihan dimaksudkan untuk Pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang dan mempunyai arah untuk: (a) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (b) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (c) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pelatihan diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional sektor KP, antara lain:

- a. Menyusun rencana aksi dan tindak lanjut Permen KP tentang Lobster, memerlukan ketersediaan kurikulum dan modul pelatihan budidaya lobster;
- b. Dukungan pelatihan terhadap strategi peningkatan produksi budidaya udang, dengan menyiapkan kurikulum dan modul pelatihan budidaya udang, pelatihan pembuatan pakan, dan membangun sdm budidaya udang;
- c. Strategi pencegahan dan penyebaran sampah plastik, pelatihan penanganan dan pengelolaan sampah plastik;
- d. Membuat prototipe miniplant solar refrigeraton, yaitu membuat pabrik es sederhana (berfungsi sebagai cold storage dan ice flake machine) dengan sumber energi tenaga surya untuk diintegrasikan sebagai sarana pengawetan produk perikanan disentra-sentra pemasaran ikan;
- e. Pelatihan kepada pelaku utama penerima bantuan pemerintah dari eselon I teknis, sebagai upaya untuk mengefektifkan bantuan bantuan yang telah diterima oleh masyarakat;
- f. Pelatihan lainnya nanti yang dibutuhkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional yang ada di sektor kelautan dan perikanan;

Pelatihan aparatur juga diarahkan kepada jenis-jenis pelatihan online atau e-learning. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan dapat menjangkau lebih jauh dengan jumlah yang lebih masif untuk peningkatan kompetensi aparatur yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini Balai Diklat Aparatur Sukamandi sudah mengembangkan sistem untuk pelatihan online aparatur KP. Sarana prasarana pendukungnya juga sudah ditingkatkan dengan menguatkan jaringan di BDA Sukamandi.

B. Penyuluhan KP

Kegiatan penyuluhan berdasarkan kepada metoda dan materi penyuluhan yang partisipatif dan inovatif dilaksanakan melalui :

- 1) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
- 2) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi)

- 3) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan
- 4) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Penataan kembali sistem penyelenggaraan penyuluhan, terutama pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dimana kewenangan penyelenggaraan penyuluhan menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan fokus kepada ketenagaan, kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan.

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan, meliputi:

- a. Pengembangan dan Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan;
 - Peningkatan kelas kelompok mandiri
 - Percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah
 - Penempatan dan penyebaran penyuluh di sekretariat penyuluhan di kab/kota
 - Membuat piramida model penyuluh (PNS, PPB dan Penyuluh Swadaya)
- b. Peningkatan Kapasitas Penyuluh;
 - Peningkatan daya saing penyuluh PNS
 - Pengembangan dan pembinaan penyuluh perikanan bantu (PPB)
 - Pembinaan Penyuluh Perikanan swadaya
- c. Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan berbasis digital;
 - Pengembangan materi *cyber extention*
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan teknologi
 - Pengembangan penyuluhan wilayah potensi perikanan (mapping)
 - Membangun Sistem Penyuluhan Digital, yang memuat sistem absensi, sistem pelaporan kinerja, dan sistem konsultasi/pendampingan
 - Membangun sistem penilaian kinerja penyuluh PNS, P3K & Swadaya berbasis lokasi (gps)
 - Membangun standar *digital library*, dengan memuat modul-modul yang lengkap sehingga penyuluhan dapat menjadi *Pool knowledge*
- d. Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - Penataan sarana dan prasarana penyuluhan
 - Pengelolaan Balai/Pos/Satker Penyuluhan

- Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
- e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan
 - Pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja
 - Peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh
 - Pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi

Berkaitan dengan agenda peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, disusun **4 (empat) sasaran pokok** dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Pertama** Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Perencanaan partisipatif; (2) Pelatihan dan pendampingan; (3) Tahap peningkatan skala usaha kelompok menuju UMKM KP unggulan (4) Tahap penumbuhan kelompok usaha mandiri; (5) Tahap pemantapan kelompok; (6) Tahap pengembangan kelompok; dan (7) Kegiatan pendampingan kelompok atau gabungan kelompok pada tahap pra-produksi, produksi, dan diversifikasi produk.
- 2) Sasaran Kedua** Peningkatan Penguasaan Manajemen Usaha, Teknologi dan penjaminan mutu produksi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Penguasaan kelompok masyarakat mitra terhadap manajemen usaha; (2) Penguasaan masyarakat mitra terhadap teknologi produksi; (3) Peningkatan mutu dan nilai tambah; (4) Segmentasi pasar dan preferensi konsumen; dan (5) Pengawasan mutu produk.
- 3) Sasaran Ketiga** Pengembangan Permodalan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Mobilisasi dana bersama dalam kelompok; (2) Bimbingan pengelolaan dana bersama; dan (3) Bimbingan pengenalan sumber-sumber permodalan.
- 4) Sasaran Keempat** Pengenalan dan Perluasan Pasar. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengenalan kelompok atau gabungan kelompok kepada akses pasar lokal; (2) Pengenalan pada pasar regional maupun internasional; dan (3) Pengenalan kelompok pada diversifikasi produk.

C. Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan SDM KP

Kerjasama program pelatihan dan penyuluhan KP bertujuan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dengan *stakeholder*. Kerjasama dilakukan dapat dilakukan dengan

perguruan tinggi, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, NGO atau LSM, Dunia Usaha/industri, lembaga dalam dan luar negeri, individu yang mempunyai korelasi dengan pelatihan dan penyuluhan serta *stakeholder* lainnya.

Kerjasama penyelenggaraan pelatihan diarahkan pada *Open Resources* dengan membangun Sistem Pelatihan dengan melibatkan dunia usaha dan industri (*hightech recomanded*) serta menyusun kurikulum dan modul dengan melibatkan pakar expert (pakar). Menjaring kerjasama peningkatan kompetensi instruktur & widyaiswara, melalui pemagangan luar negeri (3 – 6 bln/1 th) bekerja sama dengan BUMN dan industri global lainnya.

Agenda kerjasama pelatihan dan penyuluhan dalam mengembangkan sistem pelatihan KP, sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Sasaran Pertama

Terpenuhinya modal usaha kelompok yang digali dari anggota kelompok itu sendiri, donatur perorangan, pemerintah daerah, lembaga donor dalam dan luar negeri, lembaga keuangan maupun perusahaan dalam rangka pemanfaatan dana tanggungjawab sosial masyarakat (CSR). Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Membuat kriteria seleksi calon anggota kelompok; (2) Sosialisasi paket-paket pelatihan unggulan dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaku utama/ dan atau pelaku usaha; (3) Menjual paket pelatihan sertifikasi dalam rangka menyiapkan tenaga kerja siap pakai; (4) Sosialisasi paket pelatihan dalam rangka mendukung isu pemanasan global dan degradasi ekosistem pesisir; dan (5) Melakukan kerjasama antara lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan lembaga penempatan kerja.

b. Sasaran Kedua

Terpenuhinya sarana pelatihan dan penyuluhan dari sumber-sumber pembiayaan seperti tersebut pada sasaran pertama. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Memperluas jejaring kerjasama yang komplementer dan saling menguntungkan dalam rangka pemenuhan sarana pelatihan dan penyuluhan tertentu yang bersumber dari pemerintah daerah maupun sumber-sumber lain dalam negeri; dan (2) Mencari dana hibah luar negeri dari lembaga donor negara sahabat dalam rangka pemenuhan sarana pelatihan dan penyuluhan terkini.

c. Sasaran Ketiga

Peningkatan kapasitas SDM-KP melalui pembiayaan yang bersumber dari non APBN KKP. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas

pengembangan diletakkan pada: (1) Memperluas jejaring kerjasama antara lembaga pelatihan dengan berbagai lembaga donor di luar negeri dalam rangka hibah pelatihan maupun penyuluhan; dan (2) Kerjasama antar lembaga pelatihan dan penyuluhan di luar sektor perikanan dalam rangka peningkatan kompetensi antar pengelola pelatihan dan penyuluhan kedua belah pihak.

3.5 Strategi Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2020-2024, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha mendukung masyarakat KP meningkat kesejahteraannya

Strategi 1: Membangun sistem penyuluhan KP yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM serta program eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah

Langkah Operasional:

1. Penguatan kelembagaan pelaku usaha/masyarakat kelautan dan perikanan (penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok)
2. Menyiapkan Programa Penyuluhan Perikanan yang partisipatif, kolaboratif dan integral
3. Mendiseminasikan inovasi hasil riset teknologi kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
4. Mengembangkan sistem informasi penyuluhan kelautan dan perikanan berbasis online
5. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Perikanan berbasis kebutuhan inovasi teknologi adaptif kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Mengidentifikasi dan memetakan teknologi kelautan dan perikanan yang dibutuhkan pelaku utama kelautan dan perikanan
7. Menyiapkan NSPK Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
8. Menyusun materi penyuluhan berbasis hasil riset inovatif
9. Melakukan penguatan sarana prasarana penyuluhan
10. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan melalui Pos Penyuluhan
11. Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha
12. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan KP.

13. Penataan Kebijakan Penyuluhan KP, melalui Penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan KP, Mekanisme Penyuluhan KP, Kelembagaan, Sarpras, Metoda dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh.
14. Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama KP.
15. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (*cyber extension*); dan Temu: aplikasi, percontohan, dll.

Sasaran Strategis 2 : Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

Strategi 1: Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan

Langkah Operasional:

1. Memanfaatkan teknologi terapan dalam mendukung percepatan industrialisasi KP.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dan diseminasi teknologi yang direkomendasikan dan inovasi teknologi adaptif lokasi.
3. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil kajian kebijakan (*policy brief*) dalam merespon isu-isu terkini yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap isu-isu yang sedang dan potensial berkembang.
4. Membuat percontohan penyuluhan di lokasi binaan penyuluhan yang menerapkan teknologi inovasi hasil riset.
5. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendiseminasi hasil riset yang disesuaikan dengan teknologi adaptif lokasi.

Strategi 2: Mendukung diseminasi hasil riset selaras dengan pengembangan industri kelautan dan perikanan

Langkah operasional:

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan riset yang spesifik lokasi;
2. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga riset dalam pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan yang saling menguatkan;

3. Membuat publikasi hasil riset dengan menggunakan bahasa penyuluhan yang lebih mudah dipahami dan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku utama/pelaku usaha.

Sasaran Strategis 3 : Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

Strategi 1: Membangun sistem penyelenggaraan pelatihan berbasis kerjasama industri

Langkah operasional:

1. Menghasilkan lulusan pelatihan yang membentuk startup/wirausaha baru.
2. Melaksanakan perencanaan pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan;
3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DUDI berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.
4. Mengembangkan Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat;
5. Mengembangkan modul, kurikulum pelatihan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi
6. Meningkatkan kompetensi tenaga pelatih sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan.
7. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan diklat.
8. Meningkatkan dan mengembangkan jenis dan metode pelatihan berbasis kinerja/kompetensi;

Strategi 2 : Membangun sistem pelatihan ASN KKP sesuai kebutuhan organisasi

Berkaitan dengan agenda peningkatan kapasitas aparatur sebagai motivator dan dinamisator pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) **Sasaran Pertama:** Pemenuhan kompetensi administrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada pemenuhan kompetensi bidang administrasi, antara lain:
 - a) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen perkantoran;
 - b) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen keuangan;
 - c) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen SDM;

- d) Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen mutu;
 - e) Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen lingkungan;
 - f) Penumbuhan jiwa kewirausahaan instansi pemerintah; dan
 - g) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen publik.
- 2) **Sasaran Kedua:** Pemenuhan kompetensi teknis substansi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada:
- a) Pengembangan kompetensi bidang penangkapan ikan;
 - b) Pengembangan kompetensi bidang pembudidayaan ikan;
 - c) Pengembangan kompetensi bidang pengolahan ikan;
 - d) Pengembangan kompetensi bidang konservasi sumberdaya ikan;
 - e) Pengembangan kompetensi bidang pengawasan perikanan;
 - f) Pengembangan kompetensi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - g) Pengembangan kompetensi bidang permesinan perikanan.
- 3) **Sasaran Ketiga:** Pemenuhan kompetensi fungsional. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: a) Perekrutan; b) Litkayasa; c) Peneliti; d) Penyuluh Perikanan; e) Arsiparis; f) Pranata Komputer; g) Pranata Hukum; h) Pustakawan; i) Pengawas Perikanan; j) Dosen; k) Guru; l) Widyaiswara; m) Instruktur; dan n) Auditor.

Dengan Langkah Operasional:

1. Meningkatkan kapasitas ASN KKP sesuai kebutuhan organisasi
2. Mengembangkan modul, kurikulum diklat untuk memenuhi kebutuhan diklat jabfung/teknis 20 JP setiap pegawai per tahun.
3. Menyusun Roadmap ASN BRSDM
4. Menyusun Pola Karir dan Formasi ASN BRSDM
5. Menyusun Peta Jabatan ASN BRSDM
6. Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) BRSDM

Strategi 3: Membangun sistem pelatihan dan penyuluhan KP berbasis digital/Teknologi Informasi

Langkah Operasional:

1. Mengembangkan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pelaku utama, dengan metode pembelajaran jarak jauh e-learning, online training . dan skema blended training (gabungan online training dan klasikal).
2. Menyusun NSPK pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital.
3. Menyusun modul, kurikulum, dan materi pelatihan dan penyuluhan KP digital.

4. Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi
5. Menyiapkan perangkat/sarana untuk pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital (*e-learning*, dan *e-training*)

Sasaran Strategis 4 : . Tatakelola pemerintahan yang baik

Strategi : Membangun dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Puslatluh KP

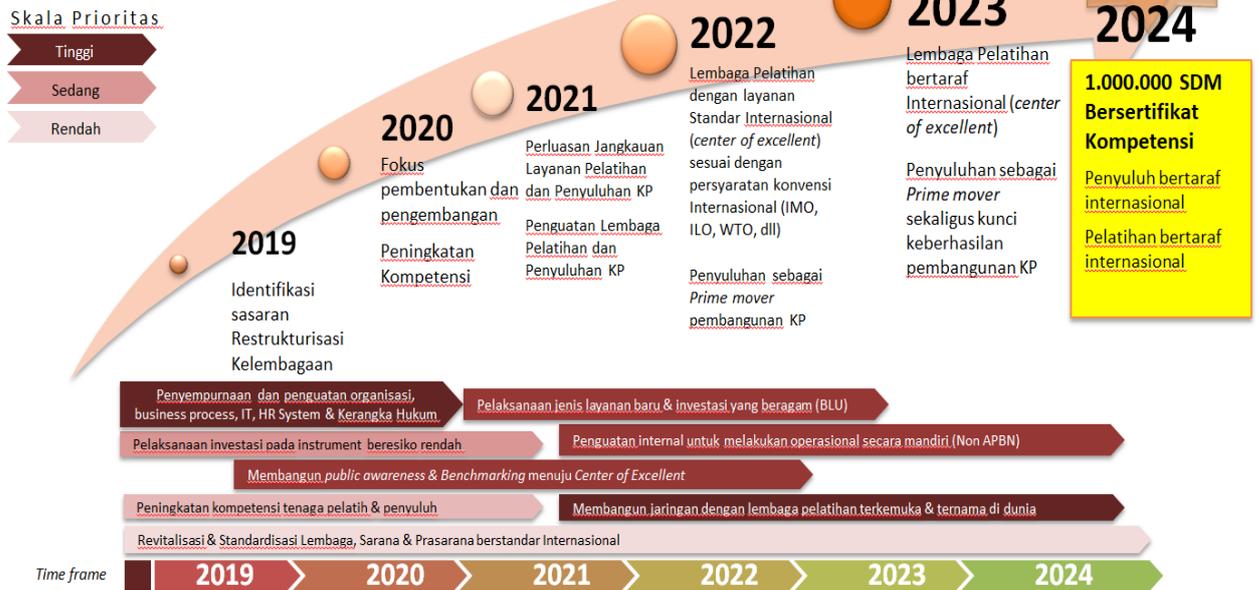
Langkah Operasional :

1. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan,
2. Meningkatkan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju satker berstatus WBK/WBBM.
3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel
4. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasan terkait dengan strategi Puslatluh dalam mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat dijabarkan sebagaimana gambar 8. Dengan Sumberdaya yang ada, baik itu SDM yang terdiri dari pegawai pusat, widyaiswara, instruktur, pengelola pelatihan, penyuluh perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu, serta kelembagaan pusat dan UPT yang melaksanakan fungsi pelatihan dan penyuluhan serta didukung dengan anggaran yang ada, merupakan modal awal untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pada prosesnya yang menjadi prioritas adalah pelatihan aparatur dan non aparatur, peningkatan keterampilan masyarakat KP, penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok serta pembentukan lembaga kemandirian kelautan dan perikanan. Pada prosesnya akan dilakukan terus evaluasi dan monitoring untuk mendapatkan *feedback* dari *stakeholder* agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kedepannya.

RANCANGAN STRATEGI PENCAPAIAN

Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Tahun 2020 - 2024



Gambar 6. Roadmap Pelatihan dan Penyuluhan KP

Tahun 2020 fokus pada pembentukan dan pengembangan peningkatan kompetensi, dengan langkah (a) penyempurnaan dan penguatan organisasi, *business process*, Teknologi informasi, *Human Research System* dan Kerangka Hukum; (b) Membangun *public awareness* dan *Benchmarking* menuju *Center of Excellent*; (c) Memiliki tenaga pelatih dan penyuluh perikanan yang kompeten dan terkoneksi dengan sistem digital; (d) Revitalisasi dan Standardisasi Lembaga, Sarana dan Prasarana berstandar Internasional.

Tahun 2021 targetnya adalah Perluasan Jangkauan Layanan Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Penguatan Lembaga Pelatihan dan Penyuluhan KP, dengan langkah (a) Memiliki lembaga pelatihan 50% berstatus BLU sehingga dapat mengelola aset dan memanfaatkan dana masyarakat sehingga mengurangi beban APBN sebesar 20-30%; (b) Membangun *public awareness* dan *Benchmarking* menuju *Center of Excellent*; (c) Memiliki tenaga pelatih dan penyuluh perikanan yang kompeten dan terkoneksi dengan sistem digital; (d) Revitalisasi dan Standardisasi Lembaga, Sarana dan Prasarana berstandar Internasional, memperluas jaringan pelayanan masyarakat melalui pelatihan dengan mendirikan 2 Balai Pelatihan di Pontianak dan Sorong, serta 3 Instalasi Balai Pelatihan di Palembang, Mandalika, dan Merauke.

Tahun 2022 menjadi Lembaga Pelatihan dengan layanan Standar Internasional (*center of excellent*) sesuai dengan persyaratan konvensi Internasional (IMO, ILO, WTO, dll), dan Penyuluhan sebagai *Prime mover* pembangunan KP, dengan langkah: (a) Memiliki lembaga pelatihan 50% berstatus BLU, dengan mulai melakukan penguatan internal untuk melakukan operasional secara mandiri (Non ABN); (b) Membangun *public awareness* dan *benchmarking* menuju *Center of Excellent*; (c) Membangun jaringan dan lembaga pelatihan terkemuka dan ternama dunia; (d) Revitalisasi dan Standardisasi Lembaga, Sarana dan Prasarana berstandar Internasional.

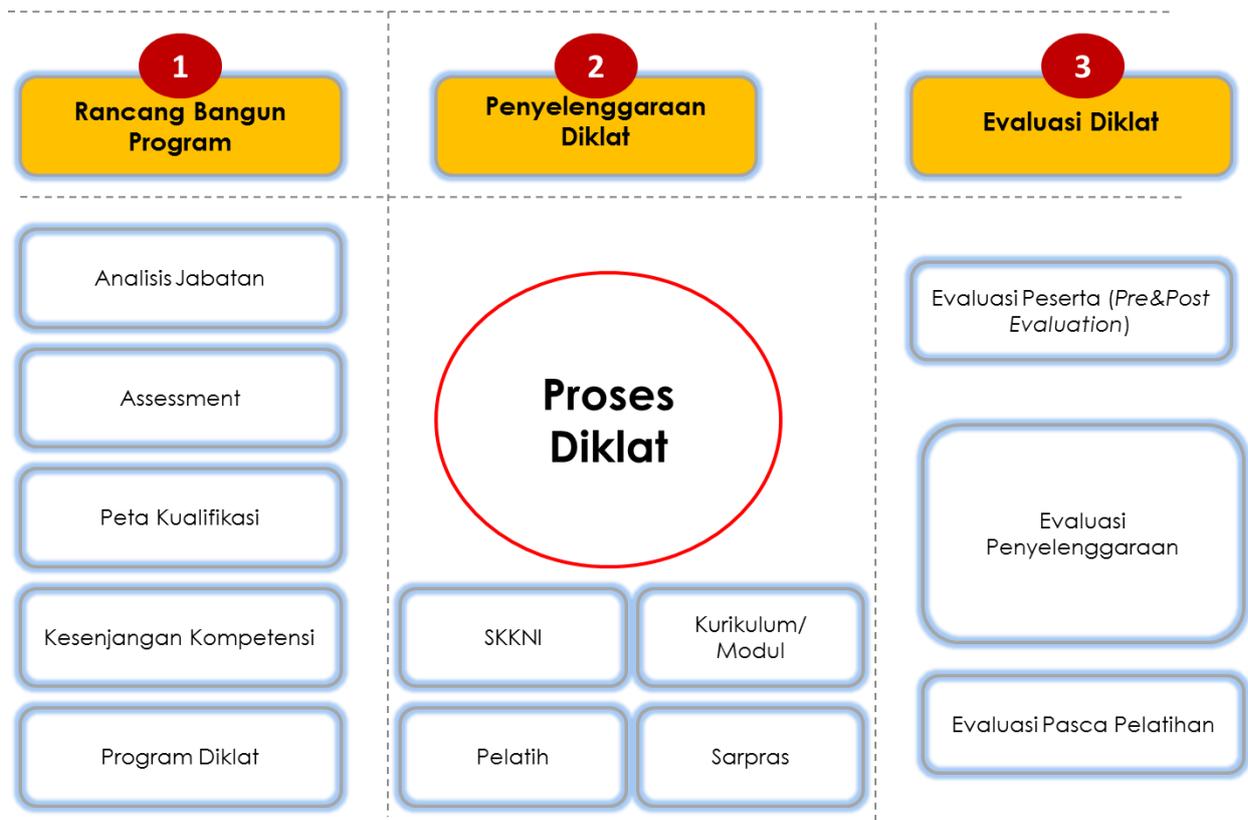
Tahun 2023 menjadi Lembaga Pelatihan bertaraf Internasional (*center of excellent*), dan Penyuluhan sebagai *Prime mover* sekaligus kunci keberhasilan pembangunan KP, dengan langkah: (a) Memiliki lembaga pelatihan 50% berstatus BLU, dengan mulai melakukan penguatan internal untuk melakukan operasional secara mandiri (Non ABN); (b) Membangun jaringan dan lembaga pelatihan terkemuka dan ternama dunia; (c) Revitalisasi dan Standardisasi Lembaga, Sarana dan Prasarana berstandar Internasional.

Tahun 2024 diharapkan Pelatihan dan Penyuluhan Mandiri dan Profesional dengan didukung Penyuluh dan Pelatihan bertaraf internasional, menjadi *training center* KKP dengan standar kompetensi dunia internasional dan mencetak 1 juta sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan Internasional dan memiliki lembaga pelatihan berstatus BLU.

Proses Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan

Adapun secara teknis pendetailan proses penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur pendukung dan dilaksanakan sesuai prosedur dan tahapannya. Secara garis besar penyelenggaraan diklat dilaksanakan dalam tiga tahapan, sebagaimana Gambar 7.

Tahap Pertama adalah Rancang Bangun Program, tahapan ini sebagai bagian dari tahapan identifikasi kebutuhan diklat. Termasuk didalamnya adalah: Analisis jabatan, *assessment* untuk mengetahui tingkat kompetensi, peta kualifikasi, selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang sudah dimiliki dengan minimal kompetensi yang harus dimiliki untuk menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Selanjutnya hasil analisis kesenjangan kompetensi tersebut menjadi dasar penyusunan program diklat yang akan diselenggarakan.



Gambar 7. Dukungan Penyelenggaraan Diklat

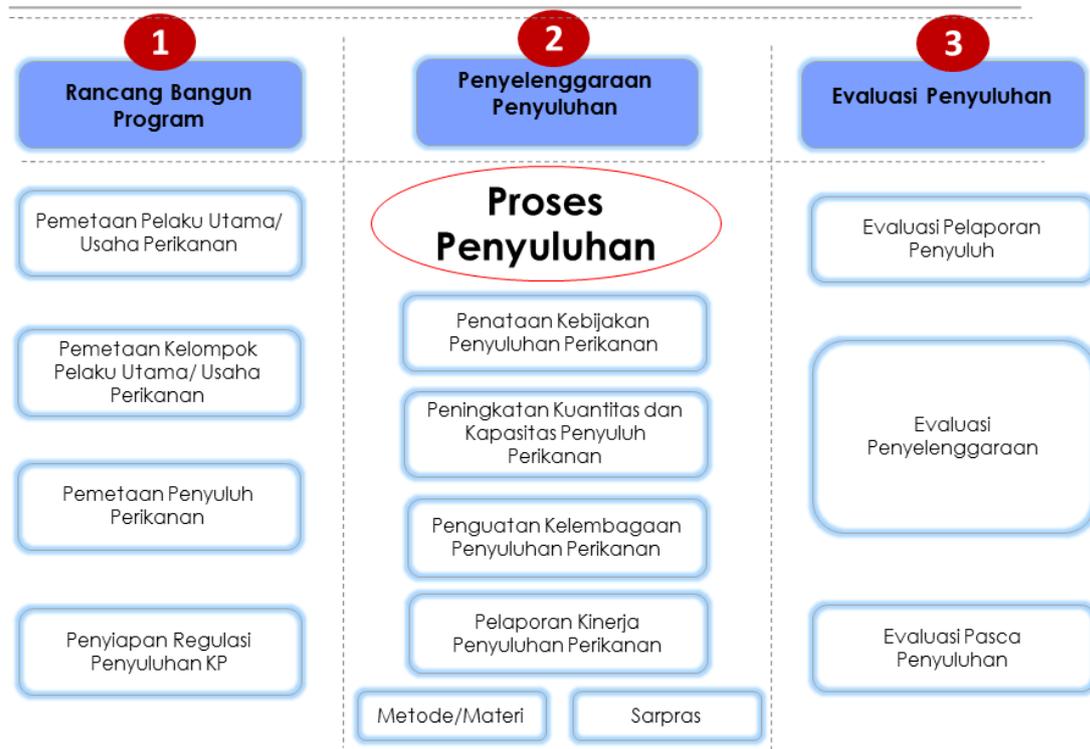
Tahap kedua adalah Penyelenggaraan Diklat, tahapan ini dimana tidak saja hanya tentang pelaksanaan diklat, akan tetapi juga menyangkut perangkat pendukungnya seperti SKKNI, Kurikulum dan Modul, pelatih yang terdiri atas widiyaiswara dan instruktur, serta sarana prasarana pelatihan.

Tahap ketiga adalah evaluasi diklat, evaluasi menyangkut kemampuan peserta latih, *pretest* dan *post evaluation*, evaluasi penyelenggaraan diklat serta evaluasi pasca pelatihan.

Sedangkan untuk pendetailan proses penyelenggaraan penyuluhan merupakan satu kesatuan yang utuh yang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagaimana Gambar 8.

Tahap Pertama, Tahap rancang bangun program yang terdiri atas pemetaan pelaku utama/usaha dan kelompoknya baik dalam hal jumlah, lokasi, identifikasi karakter sosial, budaya perorangan maupun kelompok, identifikasi jenis usaha, komoditas dan karakteristik produk yang dihasilkan, selain itu juga pemetaan penyuluh perikanan yang terdiri atas jumlah penyuluh, kompetensinya, sebarannya serta jenjang jabatannya. Selain pemetaan penyuluh dan sasaran penyuluhan, kita juga perlu membuat peyiapan regulasi penyuluhan KP sebagai acuan dan dasar hukum pelaksanaan penyuluhan. Kewenangan penyelenggaraan

penyuluhan perikanan yang sudah ditarik ke pusat, tentunya harus diatur lebih lanjut operasional pelaksanaannya dan mekanisme tata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.



Gambar 8. Proses Penyelenggaraan Penyuluhan

Tahap Kedua adalah tahap penyelenggaraan penyuluhan. Pada tahapan ini sudah mulai dilakukan penataan kebijakan terkait penyuluhan perikanan, peningkatan kuantitas dan kapasitas penyuluh perikanan, penguatan kelembagaan penyuluhan perikanan baik kelembagaan pelaku utama maupun kelembagaan penyuluh perikanan, perancangan konsep dan format pelaporan penyuluh perikanan, metode dan materi penyuluhan yang perlu dilakukan pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan KP mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan.

Tahap Ketiga yang cukup penting adalah tahap evaluasi, baik itu evaluasi terkait pelaporan kinerja penyuluh perikanan, evaluasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan serta evaluasi pasca penyuluhan. Evaluasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui dampak dari kegiatan penyuluhan kepada sasaran utama penyuluhan, sehingga dapat diketahui pengembangan yang dapat dilakukan agar pelaksanaan penyuluhan lebih efektif dan efisien.

Agenda sistem pelatihan dan penyuluhan lainnya seperti uraian dibawah ini

1) Strategi Pengembangan Sistem Bisnis Perikanan di Pedesaan

Sistem Bisnis Perikanan di pedesaan diarahkan kepada tujuan menjadikan usaha sektor KP sebagai usaha yang *profitable* dan berkelanjutan dengan pengelolaan organisasi dan keuangan yang baik. Dengan sentuhan pelatihan dan penyuluhan, diharapkan usaha-usaha sektor KP mejadi bagian dari UMKM yang mampu meningkat kelasnya dan menghasilkan produk-produk local unggulan yang mengarah pada ekspor. Hal ini tentunya akan mampu meningkatkan skala usaha pelaku utama/usaha, sehingga mampu meningkatkan pendapatannya, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP.

Terdapat 5 (lima) agenda pokok pengembangan Pelatihan dan Penyuluhan, yaitu:

- a. Pengembangan *Sistem Pelatihan dan Penyuluhan* yang yang efisien, efektif, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Peningkatan kompetensi *Aparatur* sebagai dinamisator dan motivator pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan;
- c. Peningkatan Kapasitas *Pelaku Utama/Pelaku usaha* sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan menuju UMKM KP yang unggul dan naik kelas;
- d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan;
- e. Pengembangan Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan.

Kelima agenda pokok pengembangan Pelatihan dan Penyuluhan selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Harapannya untuk mencapai UMKM KP yang meningkat kelasnya, pelatihan dan penyuluhan akan berperan dalam:

- a. Identifikasi Pelaku utama/usaha yang produktif dan *feasible* ;
- b. Analisis permasalahan pada kondisi wilayah dan usaha yang dikembangkan;
- c. Bimbingan teknis produksi, transfer teknologi, legalitas usaha, sertifikasi dan perizinan lainnya yang mengarah pada peningkatan kemampuan teknis dan manajerial bisnis;
- d. Bimbingan riset pemasaran, strategi dan keputusan bisnis;
- e. Penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan bisnis perikanan;
- f. Fasilitasi informasi Pelatihan, pemagangan, inkubasi bisnis dan peningkatan SDM lainnya; dan

- g. Fasilitasi akses sumber informasi lembaga pemasaran dan lembaga keuangan (*net working*).

2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (SIMLAT)

Berkaitan dengan agenda pengembangan sistem informasi manajemen pelatihan, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Pertama Pengembangan manajemen sistem informasi pelatihan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pembuatan *grand design* SIMLAT; (2) Penyusunan SPO SIMLAT; (3) Pembuatan aplikasi sistem informasi yang inovatif, kreatif, dan *user friendly*; dan (4) Isi SIMLAT yang informatif dan terkini.

Sasaran Kedua Pengembangan SDM pengelola. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Peningkatan kompetensi dalam hal mengelola perangkat lunak dan perangkat keras jaringan SIMLAT (*troubleshooting*); dan (2) Peningkatan kompetensi dalam mengoperasikan SIMLAT.

Sasaran Ketiga Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi pelatihan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengembangan prasarana SIMLAT dilokasi yang sulit mendapatkan akses internet; (2) Pengembangan sarana untuk memenuhi kebutuhan minimal beroperasinya SIMLAT secara terintegrasi; dan (3) Pengembangan modul pelatihan multimedia berbasis internet.

3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH)

Berkaitan dengan agenda pengembangan sistem informasi manajemen penyuluhan, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Pertama Pengembangan manajemen sistem informasi penyuluhan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pembuatan *grand design* SIMLUH; (2) Penyusunan SPO SIMLUH; (3) Pembuatan aplikasi sistem informasi yang inovatif, kreatif, dan *user friendly*; dan (4) Isi SIMLUH yang informatif dan terkini serta (5) Link SIMLUH dengan pelaporan penyuluh perikanan, Cyber extention, informasi pasar dan lain sebagainya.

Sasaran Kedua Pengembangan SDM pengelola. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Peningkatan kompetensi dalam hal mengelola perangkat lunak dan perangkat keras jaringan SIMLUH (*troubleshooting*); dan (2) Peningkatan kompetensi dalam mengoperasikan SIMLUH.

Sasaran Ketiga Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi penyuluhan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengembangan prasarana SIMLUH dilokasi yang sulit mendapatkan akses internet; (2) Pengembangan sarana untuk memenuhi kebutuhan minimal beroperasinya SIMLUH secara terintegrasi; dan (3) Pengembangan materi penyuluhan multimedia berbasis internet.

3.6 Kegiatan Prioritas Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Tahun 2020- 2024, adalah :

a. Pelatihan KP

Kegiatan prioritas pelatihan pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelatihan KP yang difokuskan pada :

- 1) Pelatihan Masyarakat KP
- 2) Pelatihan Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3) Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan
- 4) Pelatihan Aparatur KP (Reguler)
- 5) Pelatihan Teknis Fungsional KP
- 6) Sertifikasi kompetensi Masyarakat KP
- 7) Sarana Prasarana Pelatihan KP

b. Penyuluhan KP

Kegiatan prioritas penyuluhan KP pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan KP yang difokuskan pada :

- 1) Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
- 2) Penguatan kelembagaan kelompok KP
- 3) Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan izin usaha di sektor KP
- 4) Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan
- 5) Sarana prasarana penyuluhan KP

3.7 Kerangka Regulasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Renstra Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2020-2024, memerlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2020-2024, disiapkan mengacu pada program

legislasi nasional dan KKP, yang meliputi:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan;
- 2) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri tentang Mekanisme Kerja Kelembagaan Penyuluhan Perikanan;
- 4) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penilaian dan Penetapan Kelompok Perikanan Teladan/Berprestasi Nasional Pusluh KP;
- 5) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- 6) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
- 7) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perikanan;
- 8) Perubahan Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Medan, BPPP Ambon, BPPP Bitung;
- 9) Perubahan Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
- 10) Rancangan Permen tentang Pedoman Penyuluhan Perikanan;

Selain itu, Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala BRSDM Terkait Pelatihan dan Penyuluhan KP tentang:

- ✓ Penugasan Penyuluh Perikanan PNS;
- ✓ Penetapan Kinerja Penyuluh Perikanan;
- ✓ Wilayah Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan serta Balai Riset dan Penyuluhan;
- ✓ Rancangan Induk Pengembangan (RIP) SKKNI dan KKNI Sektor Kelautan dan Perikanan;
- ✓ Pedoman Pelatihan Aparatur KP;
- ✓ Pedoman Pelatihan Masyarakat.

3.8 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Kegiatan Pelatihan dan penyuluhan ditujukan kepada masyarakat perikanan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasar hasil perikanan, serta

masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara meliputi pelatihan teknis, struktural aparatur, pelatihan fungsional, dan pelatihan prajabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan lebih diarahkan kepada pendampingan kepada kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, 5 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 4 Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan, Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan kerja sama dengan lembaga lainnya yang mempunyai tugas pokok pelatihan dan penyuluhan.

Guna memperkuat jaringan dan memperluas jangkauan pelayanan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku utama, pada periode ini Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP menyiapkan strategi penyiapan kelembagaan dengan membentuk UPT baru dan mengembangkan status kelembagaan, diantaranya:

Pembentukan UPT Baru:

- 1) Instalasi BP3 Medan di Palembang
- 2) Instalasi BP3 Banyuwangi di Mataram
- 3) Instalasi Balai Sorong di Merauke

Perubahan dan Pengembangan UPT

- 1) BDA Sukamandi menjadi Pusbangkom ASN
- 2) SUPM Sorong menjadi BP3 Sorong
- 3) SUPM Pontianak menjadi BP3 Pontianak
- 4) Aset SUPM Tegal bergabung dengan BP3 Tegal
- 5) Perubahan Satker menjadi Satker Pengelolaan Keuangan (BLU)

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan, menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat. Sasaran Strategis Program Pengembangan SDM KP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Rincian Indikator Kinerja PUSLATLUH KP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 10. Indikator Kinerja PUSLATLUH Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	SS 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	kelompok	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
				2	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya	kelompok	1.735	2.000	2.000	2.000	2.000
				3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan	kelompok	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	SS 3. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	4	Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	60	60	65	70	75
				5	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	25	105	115	125	155
				6	SDM KP yang dilatih	orang	10.000	26.000	27.000	28.000	30.000
				7	Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi	orang	180	5.250	6.500	8.500	10.000
				8	Aparatur KP yang dilatih	orang	3.320	3.050	3.150	3.180	3.325
				9	Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan	unit	12	34	40	45	50
				10	Sarana dan prasarana Puslatluh yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	5	7	7	7	10

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
				11	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat	lembaga	6	6	6	6	10
				12	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti	Buah	5	5	5	5	5
4	SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	SS 4 . Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	13	Jumlah desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP	paket	5	5	5	5	5
5	SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik	SS 5. Tatakelola pemerintahan yang baik	SS 5. Tatakelola pemerintahan yang baik	14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP	Indeks	72	72	72	72	72
				15	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP	%	82	82	82	82	82
				16	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puslatluh KP	Nilai	Baik (88)				
				17	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK 2019 dibandingkan realisasi anggaran TA. 2019	%	1	1	1	1	1

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
				18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Puslatluh KP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	60	60	60	60	60
				19	Nilai Kinerja Anggaran Puslatluh KP	Nilai	85	86	87	88	89

4.1.2 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran.

4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Program kegiatan kerja Puslatluh KP sesuai rencana strategis tahun 2020 - 2024 adalah pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan kegiatan meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan bagi masyarakat Kelautan dan perikanan;
- 3) Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pendampingan melalui penyuluhan kepada pelaku utama/usaha, terdiri dari penumbuhan kelompok perikanan dan peningkatan kelas kelompok serta pendampingan pelaku utama/usaha menjadi UMKM-KP yang mendapat kemudahan akses pembiayaan, pemasaran dan pembuatan ijin usaha;
- 5) Dukungan operasional Penyuluh Perikanan yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat KP;
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan penyuluhan, kegiatan ini terdiri dari Pengadaan kendaraan fungsional pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, Pengadaan pengolahan Data;
- 7) Pengembangan Kelembagaan pelatihan dan penyuluhan, meliputi Pengembangan Ketenagaan Kelautan dan Perikanan, Penyusunan Pedoman/standar/juknis/juklak, Penyusunan database, dan Penyusunan kurikulum, modul pelatihan serta metode dan materi penyuluhan;
- 8) Pelayanan Perkantoran, kegiatan ini terdiri dari Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan penyiapan bahan-bahan pimpinan;
- 9) Dokumen Perencanaan, Data informasi dan Kerjasama, kegiatan ini terdiri dari Penyusunan Rencana Kerja, KAK, RAB, dan RKAKL, Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan, Penyusunan Standar Biaya Khusus Pelatihan dan Penyuluhan KP, Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Penyusunan Rumusan Kebijakan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Rapat Konsolidasi Perencanaan Pelatihan dan Penyuluhan KP, Koordinasi perencanaan program dengan instansi terkait, penyusunan database dan statistik pelatihan dan penyuluhan KP, Kerjasama pelatihan dan penyuluhan dengan instansi terkait lainnya, Sistem informasi, Publikasi, dan Pameran.

- 10) Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Dokumentasi, kegiatan ini terdiri dari Monitoring Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan, Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penyuluhan KP, dan Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP.
- 11) Dokumen Ketatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara, kegiatan terdiri dari Penyusunan laporan Keuangan dan BMN, Pengelolaan Administrasi Persuratan, Penyusunan Juklak Pelaksanaan Puslatuh KP, dan PBJ.
- 12) Dokumen Pengelolaan Kepegawaian dan Kelembagaan, kegiatan ini terdiri dari Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Implementasi SIMPEG.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pelatihan dapat bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait, APBD serta sumber lain yang tidak mengikat.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020 –2024 dan PNPB Tahun 2020 -2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana kerangka pendanaan seperti lampiran 1.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan perikanan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BRSDMKP tahun 2020 - 2024 dan perjanjian Kinerja BRSDMKP Tahun 2020. Rencana Strategis PUSLATLUH ini disusun untuk memberikan pedoman atau panduan sesuai dengan perkembangan arah kebijakan dan peraturan terkait dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP tahun 2020-2024. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi.

Selanjutnya guna mendukung peran strategis Puslatluh KP dalam melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan melalui penataan regulasi dan peningkatan sumber daya KP.

KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN
PENYULUHAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN,



Lilly Aprilya Pregiwati

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kerangka Pendanaan Puslatluh 2020 – 2024

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Milyar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp.Milyar)
		2020 (Renja Awal)	2021	2022	2023	2024	2020 (Renja Awal)	2021	2022	2023	2024	
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						590.16	782.8	799.3	830.2	846.9	4003.08
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih						7.23	54.5	57.5	60.5	64.8	289.29
	<i>Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)</i>	10000	26000	27000	28000	30000	-	-	-	-	-	-
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi						0.11	3.1	4.1	5.1	6	20.4
	<i>Jumlah SDM kelautan dan perikanan yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)</i>	180	5250	6500	8500	10000	-	-	-	-	-	-
	Aparatur kelautan dan perikanan yang kompeten						2.43	12.2	12.5	12.7	13.3	59.53
	<i>Jumlah aparatur kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)</i>	3320	3050	3150	3180	3325						
	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP						92.18	109.4	112.1	114.5	117.1	543.61
	<i>Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (orang)</i>	41000	42000	43000	44000	45000	-	-	-	-	-	-
	Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						3.09	38.8	43.7	58.4	68.1	237.51
	<i>Satuan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terstandar (unit)</i>	5	7	7	7	10	-	-	-	-	-	-
	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan						1.03	3.2	3.7	4.2	4.7	18.63
	<i>Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (unit)</i>	12	34	40	45	50	-	-	-	-	-	-
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan						2.82	4.5	5.5	6.5	7.5	27.47
	<i>Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan (layanan)</i>	1	1	1	1	1						
	Layanan Manajemen Satker						5.83	11.7	11.2	10.8	10.7	50.54
	<i>Jumlah layanan manajemen satker (layanan)</i>	1	1	1	1	1						
	Layanan Sarana Prasarana Internal						0.47	0.9	1.3	1.7	2.1	6.47
	<i>Tersedianya sarana dan prasarana Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (layanan)</i>	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	Layanan Perkantoran						474.97	544.5	547.7	555.8	552.6	2749.63
	<i>Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan Lingkup Latluh (bulan)</i>	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-
	<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran Lingkup Latluh (bulan)</i>	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-

Lampiran 2. Analisis SWOT Penentuan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP 2020-2024

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah kemampuan, kesanggupan dan daya yang dimiliki oleh Puslatluh KP yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali dan dijadikan sebagai sarana untuk menghasilkan pengembangan SDM KP yang unggul dan berdaya saing yaitu:

- Memiliki SDM (penyuluh, instruktur, widyaiswara, asesor dan staf pendukung) yang kompeten
- Adanya peraturan perundangan terkait pelatihan dan penyuluhan
- Menghasilkan lulusan diklat vokasi yang dibekali sertifikat kompetensi
- Produk Sertifikasi Kompetensi yang sudah diakui oleh DUDI
- Kemampuan menyelenggarakan sistem pelatihan dan penyuluhan terpadu
- Kelembagaan pelatihan yang sudah terakreditasi dan bersertifikat ISO 9001: 2015

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja lingkup Puslatluh KP. Keterbatasan yang berhasil diidentifikasi diantaranya adalah:

- Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan yang tersedia masih memerlukan revitalisasi
- Rasio pelaku utama/usaha terhadap jumlah penyuluh dan penyebarannya belum memadai
- Peran penyuluh dalam mendampingi pelaksanaan program pembangunan KP belum optimal
- Dunia industri belum sepenuhnya memberikan pengakuan terhadap kompetensi SDM

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan pelatihan dan penyuluhan KP yaitu:

- Era Industri 4.0 dan Society 5.0
- SDM unggul dan berdaya saing sebagai prioritas kebijakan pembangunan nasional
- Berbagai forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional
- Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia
- Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan

b. Ancaman (Threats)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan sehingga mengganggu kinerja BRSDMKP, yaitu:

- Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas
- Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi
- Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) adalah sebagai berikut:

		Peluang (O)	
		Kemajuan IPTEK untuk pengembangan inovasi KP	Era Industri 4.0 dan Society 5.0
Kekuatan (S)	Memiliki SDM (penyuluh, instruktur, widyaiswara, asesor dan staf pendukung) yang kompeten		Meningkatkan kompetensi ASN KP yang unggul dan berdaya saing global
	Kemampuan menyelenggarakan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terpadu	(1) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan	(3) Mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan DUDI dan Penyuluhan berbasis digital (4) Membangun sistem penyelenggaraan

		(2) Mendukung diseminasi hasil riset selaras dengan pengembangan industri kelautan dan perikanan	pelatihan berbasis kerjasama industri
Kelemahan (W)	Sarana prasarana yang tersedia masih memerlukan revitalisasi	(9) Penguatan kelembagaan dan manajerial riset dan SDM	Membangun sistem pelatihan dan penyuluhan KP berbasis digital/Teknologi Informasi
	Peran penyuluh dalam mendampingi pelaksanaan program pembangunan KP belum optimal	Membangun sistem penyuluhan KP yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM serta program eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	